YAMAHA Revs your Heart SEMAKIN DI DEPAN

# SULTENG RAYA

WAR ON DRUGS For Humanity

KAMIS, 5 NOVEMBER 2026 | 8 HALAMAN

*Perekat Rakyat Sulteng*

LANGGANAN: RP.100.000,- | ECERAN: RP.5.000,-

# Inovasi Harus Lahirkan Solusi Nyata

**SULTENG RAYA - Inovasi bukan hanya menjadi etalase kecanggihan teknologi tetapi harus mampu memberikan solusi dan manfaat ke masyarakat.**

Demikian pesan tertulis Gubernur melalui Staf Ahli Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. M. Muchlis, M.M saat membuka HGS Solution Gathering di Hotel Santika, Rabu (4/11/2026).

"Inovasi yang dikembangkan tidak cukup hanya canggih, tetapi harus memberikan manfaat nyata, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pelayanan," ucapnya menekankan Inovasi harus berorientasi pada solusi yang nyata.

Menurut Staf Ahli Muchlis, Sulteng memiliki berbagai potensi menjanjikan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan hingga industri pengolahan.

Agar berbagai potensi tersebut dapat dikonversi maka Pemprov Sulteng tuturnya, membuka ruang kolaborasi bagi dunia usaha dan mitra strategis lainnya, dalam membangun daerah melalui program-program BERANI.

Karenanya, HGS Solution Gathering diharapkan tidak sekadar forum pertemuan biasa, tetapi mampu menjembatani kebutuhan dengan solusi nyata dan memperkuat kemitraan berkelanjutan.

"Semoga lahir pemikiran-pemikiran konstruktif dan makin memperkuat kemitraan antara dunia usaha

Baca INOVASI Hal. 7

**FOTO BERSAMA** usai pembukaan acara HGS Solution Gathering di Hotel Santika, Rabu (4/11/2026). FOTO: BIRO ADPIM

RESPONS ASPIRASI PUBLIK

## Safri Dorong Fraksi PKB DPR RI Gulirkan Hak Angket Pergantian Gibran

**Muhammad Safri**

**SULTENG RAYA –** Gelombang aspirasi masyarakat yang menghendaki agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti mendapat perhatian serius dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Safri.

Safri meminta Fraksi PKB DPR RI tidak mengabaikan suara masyarakat yang semakin mempertanyakan proses pencalonan hingga pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Baca RESPONS Hal. 7

## Tim Elang Tokala Ringkus Dua Terduga Penipu Tabung Gas

**DUA TERDUGA** pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan tabung gas 3 k9. FOTO IST

**SULTENG RAYA –** Tim URC Resmob Elang Tokala Satreskrim Polres Morowali Utara berhasil mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan tabung gas 3 kg.

Keduanya adalah MS dan RF. Penangkapan dilakukan di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, pada 29 hingga 31 Oktober 2026.

Kasat Reskrim Polres Morowali Utara AKP Andi Yasser Abdullah Sutomo menerangkan, kasus ini bermula dari laporan Muhammad Sultoni, warga Desa Jamor Jaya, Kecamatan Lembo Raya, dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/116/X/2026/SPKT/POLRES MOROWALI UTARA/POLDA SULAWESI TENGAH tanggal 16 Oktober 2026.

Baca RINGKUS Hal. 7

## Sigi dan Donggala Jadi Lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi

**SULTENG RAYA** - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan terdapat dua wilayah di Sulteng untuk lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), yakni Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Kepala BPMP Sulteng Muhammad Anis di Sigi, Rabu, mengatakan target pengerjaan dan pembangunan fisik SNT itu mulai akhir 2026.

"Jadi ada 39 daerah di Indonesia segera dibangun SNT ini tahap pertama dan Provinsi Sulteng ada di Sigi serta Donggala," kata dia.

Baca TERINTEGRASI Hal. 7

**KEPALA** BPMP Sulteng Muhammad Anis (kanan) menjelaskan mekanisme pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sigi, Rabu (4/11/2026). FOTO: ANTARA/MOH SALAM

## Pertamina Dukung Kebutuhan BBM untuk Penanganan Karhutla di Sulteng

**SULTENG RAYA** - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus mendukung kebutuhan energi untuk kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah. Dukungan BBM diberikan guna menunjang mobilitas kendaraan pemadam kebakaran, mobil tangki air, serta operasional tim gabungan yang melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Poso dan Buol.

Sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan BBM, Pertamina mengoptimalkan proses pendaftaran kendaraan operasional pemadam kebakaran melalui program Subsidi Tepat agar

Baca PERTAMINA Hal. 7

FOTO: ILUSTRASI

**PENGUKUHAN** pengurus DWP Dinas PMD dan Dinas Kominfo Parigi Moutong, di aula lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu (4/11/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

## Pengurus DWP PMD dan Kominfo Parigi Moutong Resmi Dikukuhkan

**SULTENG RAYA –** Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Parigi Moutong menggelar monitoring dan evaluasi (monev) sekaligus pengukuhan pengurus DWP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Rabu (4/11/2026).

Pengukuhan tersebut dilakukan terhadap pengurus DWP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta DWP Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Parigi Moutong.

Baca PENGURUS Hal. 7

**PERTEMUAN** Kapolres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono dan Dandim 1306/Kota Palu, Kolonel Inf. Yudhi Hendro Prasetyo dalam rangka mempererat silaturahmi dan sinergitas TNI-Polri, di Makodim 1306/KP, Selasa (3/11/2026). FOTO: HUMAS POLRES SIGI

## Tatap Muka Kapolres Sigi dan Dandim 1306/Kota Palu Perkuat Sinergitas

**SULTENG RAYA** – Dalam semangat mempererat persaudaraan dan memperkuat sinergitas TNI-Polri, Kapolres Sigi AKBP Agus Dwi Cahyono, S.I.K., M.A.P., melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Komandan Kodim (Dandim) 1306/Kota Palu, Kolonel Inf. Yudhi Hendro Prasetyo, Selasa (3/11/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Makodim 1306/Kota Palu itu berjalan dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan kekeluargaan.

Kapolres Sigi didampingi Pabung Sigi Mayor Tarno, Kabagops Polres Sigi AKP Musa, S.Sos., M.M., Kasilog Kodim Mayor Rizal, Danunit Kodim Kapten Wayan, Pasiops Kodim Kapten Arnol, serta Kasatintelkam Polres Sigi AKP Adhitya Meideski, S.T., bersama sejumlah pejabat utama dan perwira dari Polres Sigi maupun Kodim 1306/Kota Palu.

Kapolres mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus memperkuat koordinasi antara jajaran Polres Sigi dan Kodim 1306/Kota Palu.

Melalui suasana penuh kekeluargaan, kedua institusi menunjukkan komitmen untuk terus menjaga soliditas dan meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Sigi.

"Sinergitas TNI-Polri bukan sekadar hubungan antarlembaga, melainkan cerminan kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

Komunikasi serta koordinasi yang terus terjalin menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan damai. AMR

**PENYERAHAN** berkas perkara penganiayaan anak yang dinyatakan lengkap dari PPA Polresta Palu ke pihak kejaksaan, Selasa (3/11/2026). FOTO: HUMAS POLRESTA BANGGAI

## PPA Polresta Banggai Serahkan Berkas Perkara Penganiayaan Anak

**SULTENG RAYA** – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banggai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur ke Kejaksaan, Selasa (3/11/2026).

Penyerahan dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebagaimana pemberitahuan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Banggai tertanggal 30 Oktober 2026.

Kegiatan Tahap II dipimpin Brigpol Widyawati Pratiwi, S.H. Tersangka berinisial SA (17) warga Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Maahas, Luwuk Selatan beserta barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Reza.

Menurut Kasi Humas Polresta Banggai, AKP Saiman, peristiwa terjadi pada Jumat (22/11/2024) di Kelurahan Puge, Kecamatan Luwuk Selatan. Saat itu korban bersama seorang rekannya sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor.

Dalam perjalanan, keduanya diduga dihadang oleh sejumlah orang hingga terjatuh dari kendaraan.

"Korban inisial PVR (16) mengalami tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada bagian wajah dan kepala," ujarnya.

Atas kejadian tersebut, penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Banggai melakukan serangkaian proses penyidikan hingga perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kasi Humas menegaskan pelaksanaan Tahap II merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menuntaskan penanganan perkara secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. AMR

# Kapolda Minta Peran Tokoh Agama Jaga Kondusifitas Keamanan di Sulteng

**SULTENG RAYA** – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Kapolda Sulteng) Irjen Pol. Rizal Irawan menerima kunjungan silaturahmi Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) bersama sejumlah pimpinan gereja dari berbagai denominasi di Sulawesi Tengah, Rabu (4/11/2026) siang.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Sulteng, Jalan Soekarno Hatta tersebut turut dihadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Semmy Ronny Thabaa, Kepala Biro Logistik, serta Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sulteng.

Rombongan yang hadir dipimpin Ketua Umum Sinode GPID, Pendeta Alexander Rondonuwu, bersama sejumlah perwakilan pimpinan gereja, diantaranya Gereja Advent, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI), serta Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII).

Kunjungan silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan, membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Sulteng dan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sulawesi Tengah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin komunikasi dan kerja sama yang semakin baik antara Polri dan para pemuka agama, khususnya dalam memperkuat toleransi, menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman.

Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Achmad Muhaimin mengatakan, silaturahmi dengan para tokoh agama merupakan salah satu langkah penting dalam membangun kemitraan dan memperkuat peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas.

Peran tokoh agama sangat penting dalam menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, serta menciptakan suasana yang damai dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat.

"Polda Sulteng senantiasa terbuka untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan seluruh elemen keagamaan guna bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," ujar Achmad Muhaimin.

Ia menambahkan, hubungan yang baik antara Polri dan tokoh agama diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama dalam merawat toleransi, memperkokoh persatuan, serta menjaga kedamaian di Sulteng

Polda Sulteng berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan memperkuat kemitraan dengan seluruh tokoh agama serta elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif. AMR

**KAPOLDA** Sulteng Irjen Pol Rizal Irawan, saat menerima kunjungan rombongan para pendeta dari denominasi gereja di Sulteng, bertempat di ruang kerja Kapolda, Rabu (4/11/2026). FOTO: HUMAS POLDA SULTENG

OPERASI PATUH TINOMBALA

## Satlantas Touna Kedepankan Pendekatan Simpatik dan Edukatif

**SULTENG RAYA** – Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tojo Una-Una (Touna) kembali menggencarkan penegakan hukum melalui Ops Patuh Tinombala 2026. Pada Rabu (4/11/2026) pagi, Subsatgas Gakkum turun langsung menggelar penertiban di Jalan Tadulako, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota.

Razia tersebut mengusung pendekatan yang humanis. Sebanyak tujuh personel Satlantas yang dikerahkan tampak aktif memberikan teguran lisan, tertulis, serta peringatan simpatik dan edukatif kepada para pengguna jalan yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Touna, AKP H. Siswanto menegaskan, fokus utama Operasi Patuh tahun ini bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan membangun kesadaran hukum masyarakat.

"Cara bertindak kami kedepankan secara simpatik dan edukatif. Tujuannya agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya menaati aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama," ujar Siswanto.

Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Touna menargetkan peningkatan kesadaran serta pemahaman masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas. AMR

**PERSONEL** Satlantas Polres Touna, saat melaksanakan Operasi Patuh Tinombala 2026, di salah satu ruas jalan Kota Ampana, Rabu (4/11/2026). FOTO:DOK.SATLANTAS POLRES TOUNA

# Kantor Imigrasi Palu Kerjasama PT Pos Dalam Layanan Sipengantar Paspor

KEPALA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, berpose bersama Pejabat POH Executive General Manager Kantor Cabang Utama Palu 94000 PT. Pos Indonesia, Erik Pasorongan, usai penandatanganan perjanjian kerja sama di Ruang Aula Adiwinata Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Senin (2/11/2026). **FOTO: HUMAS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU**

**SULTENG RAYA -** Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Pos Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui layanan pengantaran paspor yang diberi nama "Sipengantar".

Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan di Ruang Aula Adiwinata Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dan dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, beserta jajaran pejabat, Pejabat POH Executive General Manager Kantor Cabang Utama Palu 94000 PT. Pos Indonesia, Erik Pasorongan dan Kepala Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. H Musliman Malappa, Senin (2/11/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan, melalui kerja sama ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu berupaya menghadirkan inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam memperoleh paspor yang telah selesai diproses.

"Dengan adanya layanan Sipengantar, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pengantaran paspor melalui PT Pos Indonesia tanpa harus kembali datang ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor secara langsung," kata Akmal.

Dikatakannya, penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dan PT Pos Indonesia dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang semakin modern, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Diharapkan, melalui layanan Sipengantar, pelayanan keimigrasian semakin prima serta mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih praktis, cepat, aman, dan transparan bagi masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat," harapnya.*/YAT

# Brimob Sulteng Gelar Donor Darah Bersama TNI dan Bhayangkari

**SULTENG RAYA –** Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Brimob Polri ke-81, Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Aula Satya Haprabu, Mako Satbrimob Polda Sulteng, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan kemanusiaan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan PMI Kota Palu serta melibatkan berbagai unsur TNI-Polri dan Bhayangkari sebagai bentuk sinergitas dan kepedulian sosial terhadap masyarakat.

Sejumlah satuan turut diundang untuk berpartisipasi, di antaranya Korem 132/Tadulako, Yonif 711/Raksatama, Lanal Palu, Direktorat Samapta Polda Sulteng, Direktorat Polairud Polda Sulteng, serta Bhayangkari Satbrimob Polda Sulteng.

Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah melalui Kasi Kesjas Satbrimob Polda Sulteng, Iptu Yosapat Pandean, S.K.M., menerangkan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Korps Brimob Polri ke-81 sekaligus wujud kepedulian Brimob terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, Satbrimob Polda Sulteng menargetkan pengumpulan sebanyak 200 kantong darah melalui kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Satbrimob Polda Sulawesi Tengah.

"Target tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan stok darah, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan transfusi darah," katanya.

Melalui kegiatan ini, Satbrimob Polda Sulteng ingin menegaskan bahwa pengabdian Korps Brimob tidak hanya diwujudkan melalui tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi sesama.

Momentum HUT Brimob Polri ke-81 menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat solidaritas, sinergitas, dan semangat berbagi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan tema peringatan HUT Brimob Polri ke-81, yaitu Brimob Bersama Masyarakat, sebagai wujud pengabdian yang terus tumbuh melalui kepedulian dan aksi nyata.*/YAT

SATUAN Brimob Polda Sulawesi Tengah saat menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Aula Satya Haprabu, Mako Satbrimob Polda Sulteng, Selasa (3/11/2026). **FOTO: DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG**

# Kodam XXIII/PW Teguhkan Disiplin dan Soliditas Melalui Upacara Bendera Mingguan

KODAM XXIII/Palaka Wira saat melaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan Makodam XXIII/Palaka Wira, Kota Palu, Senin (2/11/2026). **FOTO: PENDAM XXIII/PW**

**SULTENG RAYA -** Dalam rangka memelihara kedisiplinan, meningkatkan jiwa nasionalisme, serta memperkuat soliditas prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kodam XXIII/Palaka Wira (PW) melaksanakan upacara bendera mingguan di lapangan Makodam XXIII/Palaka Wira, Kota Palu, Senin (2/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Kapaldam XXIII/Palaka Wira Kolonel Cpl Anthoni P. Sinaga bertindak selaku Inspektur Upacara. Kegiatan diikuti oleh Prajurit dan PNS di lingkungan Kodam XXIII/Palaka Wira.

Upacara bendera berlangsung dengan tertib dan khidmat. Kegiatan rutin setiap hari Senin ini menjadi salah satu sarana pembinaan satuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, meningkatkan disiplin, serta memperkuat rasa tanggung jawab dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan tersebut, Kodam XXIII/Palaka Wira terus berkomitmen membangun prajurit dan PNS yang profesional, solid, serta senantiasa siap menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.*/YAT

# Pegawai Kantor Imigrasi Palu Dilatih Bahasa Inggris dan Mandarin

PEGAWAI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu saat mengikuti pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin, Selasa (3/11/2026). **FOTO: TANGKAPAN LAYAR**

**SULTENG RAYA -** Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu menyelenggarakan pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin bagi pegawai, Selasa (3/11/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan komunikasi pegawai dalam menghadapi dinamika pelayanan keimigrasian yang semakin berkembang, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga negara asing.

"Pelatihan yang berlangsung selama satu diawali dengan pelatihan bahasa mandarin dan dilanjutkan pelatihan bahasa inggris di hari berikutnya. Melalui penguasaan Bahasa Inggris dan Mandarin, diharapkan para pegawai dapat berkomunikasi secara lebih efektif, profesional, dan responsif ketika berinteraksi dengan warga negara asing, baik dalam proses pelayanan, pengawasan, maupun pelaksanaan tugas keimigrasian lainnya," harapnya.

Selain meningkatkan keterampilan berbahasa, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TP Palu dalam mendorong pengembangan kapasitas dan profesionalisme pegawai agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berorientasi pada standar internasional.*/YAT

# Eks Kapolri Listyo Jadi TSK Kejahatan Terjahat di Sejarah Polri

**SULTENG RAYA -** Mabes Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara penyadapan illegal terhadap Presiden RI. Salah satu tersangka diketahui merupakan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Listyo Sigit merupakan Kapolri terlama, pernah mendapat bintang mahaputra, dan dipuji oleh Presiden karena bisa mengerahkan Polri menanam jagung. Listyo bahkan oleh pimpinan Komisi III disebut polisi terbaik sepanjang sejarah.

"Ternyata (Listyo) jadi tersangka sebagai pelaku kejahatan terjahat di sepanjang sejarah Polri yakni menyadap kepala negaranya sendiri. Gilaaaa," ujar Mahfud MD lewat kicauan di X.

Mahfud MD

Mahfud diketahui pernah bersama dalam satu jajaran kabinet dengan Listyo di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Selain LSP, dua tersangka lain yakni Irjen ASN, dan EH. Selain Presiden, mereka yang disadap yakni pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, dan pengusaha.

Mahfud mengakui, dalam hal tertentu patut dicatat bahwa Presiden Prabowo bisa bersikap tegas. Selain Listyo Sigit, ada juga mantan kepala Badan Giza Nasional (BGN) Dadan Hidayana yang dulu selalu dibela dan dipuji-puji oleh Presiden akhirnya digelandang ke pengadilan karena kasus korupsi gila-gilaan di program MBG.

Selanjutnya, lanjut Mahfud, ada Febrie Adriansyah yang katanya algojo koruptor dan merupakan orang kepercayaan Prabowo. Febrie yang juga eks Jampidsus akhirnya dikirim ke pengadilan karena dakwaan korupsi di atas korupsi.

"Jadi jangan keterlaluan berkorupsi ria dan melakukan pengkhianatan, misalnya karena merasa sok dekat dengan Presiden Prabowo. Kalau Anda keterlaluan, ditindak tegas juga kan? Ayo, Pak Presiden, gembirakan rakyat dengan ketegasan yang lebih banyak lagi."

Menurut Kabareskrim pada 2025-2026 tersangka memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam penyadapan Polri. Mereka memasukkan ke dalam satu server link tanpa verifikasi.

Nomor itu disadap tanpa proses sesuai dengan penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada Oktober 2026, tersangka memerintahkan penghapusan sistem ke link tersebut.

Pelapor yang mengetahui lantas membuat laporan pada 23 Oktober. Bareskim kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memeriksa saksi 10 orang dan tiga orang saksi ahli.

"Kita melakukan penyitaan barang bukti HP 11 unit, 1 unit Ipad dan flasdisk 4 buah berdasarkan scientific investigation," ujar Kabareskrim.RPB

# Film Pasukan 1.000 Janda Angkat Ketangguhan Perempuan Aceh

KONFERENSI pers film Pasukan 1000 Janda di Jakarta pada Senin (2/11/2026). **FOTO: DOK. MG168**

**SULTENG RAYA -** Kesedihan dan kehilangan tak selalu membuat seseorang berhenti melangkah. Dalam situasi tertentu, pengalaman pahit justru dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Pesan inilah yang coba diangkat melalui kisah Laksamana Malahayati dalam film Pasukan 1000 Janda.

Pemeran Malahayati, Atiqah Hasiholan, mengaku bangga terlibat dalam film yang mengangkat perjuangan perempuan tersebut. Menurut dia, kisah Malahayati memperlihatkan bagaimana perempuan mampu mengubah pengalaman menyakitkan menjadi kekuatan untuk terus melangkah.

"Kalau dari aku senang dan bangga karena ternyata 500-400 tahun lalu perempuan itu sudah bisa mengubah hal yang menakutkan dan menyakitkan menjadi sebuah perjuangan yang besar," kata Atiqah dalam konferensi pers film tersebut di XXI Epicentrum, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Atiqah mengatakan, perempuan dalam kisah tersebut tidak memilih larut dalam kesedihan. Sebaliknya, pengalaman pahit yang mereka hadapi justru menjadi pemantik untuk bangkit dan mengambil peran dalam perjuangan. "Jadi bukan mereka jadi malas, sedih, malah jadi terpuruk, tapi hal sedih itu menjadi pembakar buat mereka untuk maju di depan," kata dia.

Selain menghadirkan kisah perjuangan perempuan, Atiqah menilai pengangkatan sosok Malahayati menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki figur pahlawan perempuan yang patut dikenal lebih luas. Selama ini, cerita kepahlawanan dalam film kerap menempatkan laki-laki sebagai tokoh utama. Padahal, sejarah Indonesia juga memiliki perempuan dengan keberanian dan kemampuan luar biasa.

Dia menyebut Malahayati sebagai sosok yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga hingga ke Eropa karena telah berhasil mengalahkan penjajah-penjajah yang masuk ke Indonesia. Atiqah berharap kehadiran film ini dapat mendorong para pembuat film untuk mengangkat lebih banyak kisah pahlawan perempuan dari sejarah Tanah Air.

"Jadi luar biasa sekali, semoga dengan adanya film Pasukan 1000 Janda ini, filmmaker-filmmaker lain juga mungkin lebih terinspirasi, 'oh kayaknya banyak nih hero-hero lain dari Indonesia dan juga yang perempuan'," kata Atiqah. Sutradara sekaligus penulis film, Archi Hekagery, mengatakan pengangkatan kisah Malahayati memiliki kedekatan personal baginya. Sebagai orang Aceh, dia ingin menghadirkan cerita tentang pahlawan dari tanah leluhurnya agar lebih dikenal masyarakat luas, terutama generasi muda. Archi mengaku salah satu motivasinya membuat film tersebut adalah agar anaknya sendiri mengetahui bahwa Indonesia memiliki sosok pahlawan perempuan dengan perjuangan besar. "Dan yang paling penting adalah pengen banget bikin film untuk anak gue pribadi sih, anak gue sendiri karena supaya dia tahu bahwa bangsanya punya pahlawan sehebat Malahayati," kata Archi.

Dia berharap film tersebut tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat memperkenalkan kembali sejarah perjuangan bangsa kepada generasi mendatang. Dengan begitu, anak-anak Indonesia bisa mengenal sosok Malahayati dan mengetahui bahwa Tanah Air memiliki tokoh perempuan dengan kisah perjuangan yang membanggakan.

Halaman 3 / 3 serupa disampaikan produser Yuda Wirafianto. Menurut dia, film ini membawa pesan bahwa perempuan Indonesia bukan sosok yang rapuh atau mudah diremehkan. Perempuan juga memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri, keluarga, hingga Tanah Air-nya.

"Saya berharap ini jadi legacy ya, bahwa perempuan Indonesia itu bukan perempuan yang rapuh, bukan perempuan yang gampang untuk dikatakanlah dieksploitasi, apalagi dijajah, apalagi untuk dianggap remeh," kata Yuda.

Dia mengatakan film tersebut didedikasikan bagi keluarga Indonesia dari berbagai kalangan. Dia berharap pesan perjuangan yang dihadirkan dalam film dapat tersampaikan dengan baik kepada para penonton.

Film Pasukan 1000 Janda dijadwalkan tayang di bioskop mulai 12 November 2026. Melalui kisah Malahayati dan pasukan Inong Balee, film ini diharapkan dapat mengingatkan masyarakat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa.RPB

# TelkomGroup dan PLN Jajaki Pengembangan Pusat Data AI Nasional

**SULTENG RAYA -** PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), PT PLN (Persero), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjajaki kolaborasi pengembangan National AI Data Center Hub dengan pendekatan berbasis kawasan industri.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara NeutraDC dan pengelola kawasan industri terpadu, serta antara Telkom dan PLN. Penandatanganan berlangsung pada 27 Oktober 2026 dan diumumkan dalam rangkaian Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta.

Inisiatif ini diarahkan untuk menyelaraskan kebutuhan energi, kesiapan lahan dan utilitas kawasan industri, serta pengembangan infrastruktur digital yang mampu mendukung kebutuhan komputasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kebutuhan infrastruktur pusat data meningkat seiring dengan meluasnya penggunaan AI. Beban kerja AI membutuhkan kapasitas listrik, sistem pendingin, dan konektivitas yang lebih besar dibandingkan pusat data konvensional. Karena itu, ketersediaan lahan, pasokan listrik yang andal, dan dukungan utilitas menjadi faktor penting dalam pengembangan fasilitas tersebut.

Pendekatan berbasis kawasan industri dipilih karena memungkinkan kesiapan lahan, utilitas, akses logistik, dan tata ruang direncanakan dalam satu ekosistem. Dengan demikian, pembangunan pusat data dapat diselaraskan sejak awal dengan kebutuhan energi dan konektivitas.

Managing Director of Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Irwan Rei mengatakan pengembangan infrastruktur AI dalam skala nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dengan kapabilitas yang saling melengkapi.

"Pengembangan infrastruktur AI dalam skala nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dengan capability yang berbeda namun saling melengkapi. Peran Danantara Indonesia adalah membantu mengorkestrasi BUMN, infrastructure providers, technology partners, dan investment ecosystem sehingga pengembangan teknologi tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi memiliki jalur menuju adoption, utilization, dan penciptaan nilai bagi ekosistem nasional," katanya dalam keterabgan, Jumat (30/10/2026).

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan pengembangan AI membutuhkan fondasi infrastruktur yang mampu mendukung kebutuhan komputasi dalam skala besar.

"Pengembangan AI tidak hanya membutuhkan model dan aplikasi, tetapi juga fondasi infrastruktur yang mampu mendukung kebutuhan komputasi dalam skala besar. Melalui kolaborasi ini, TelkomGroup ingin menghubungkan capability data center dan konektivitas dengan kekuatan ekosistem energi, kawasan industri, AI, dan cloud agar dapat mendukung pengembangan sovereign AI infrastructure Indonesia secara lebih terintegrasi," katanya.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), PT PLN (Persero), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjajaki kolaborasi pengembangan National AI Data Center Hub dengan pendekatan berbasis kawasan industri. FOTO: DOK TELKOM

Dalam kolaborasi tersebut, setiap pihak membawa kapabilitas sesuai bidangnya. Pengelola kawasan industri menyediakan dukungan berupa kesiapan lahan, utilitas, dan ekosistem pendukung. PLN berperan dalam penyediaan pasokan listrik, kesiapan jaringan, dan keandalan daya.

Sementara itu, TelkomGroup melalui NeutraDC membawa keahlian dalam pembangunan dan pengoperasian pusat data, konektivitas, serta infrastruktur digital terintegrasi. Danantara Indonesia berperan mengoordinasikan kolaborasi antar-BUMN, mitra teknologi, dan ekosistem investasi.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan kebutuhan listrik sektor pusat data diperkirakan meningkat seiring perkembangan transformasi digital.

"Pertumbuhan industri data center di Indonesia membutuhkan dukungan listrik yang tidak hanya besar, namun juga andal dan stabil. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan kesiapan infrastruktur kelistrikan yang mampu mengikuti perkembangan proyek. Melalui kolaborasi ini, PLN siap menjajaki skema penyediaan infrastruktur kelistrikan yang sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan aspek reliability, scalability, dan sustainability," tutup Suroso.

Pengembangan National AI Data Center Hub juga menjadi bagian dari arah dalam National Sovereign Technology Roadmap Telkom untuk mendukung pembangunan pusat data AI nasional dan infrastruktur AI berdaulat.

Meski demikian, pengumuman kolaborasi dalam DTIIF 2026 masih merepresentasikan kesepahaman strategis dan penyelarasan ekosistem. Kesepakatan tersebut belum menetapkan nilai investasi, kapasitas pembangunan, arsitektur teknologi, tahapan penerapan, maupun model komersial tertentu.

Pembahasan lebih lanjut mengenai lingkup pekerjaan, kebutuhan teknis, skema investasi, pengaturan komersial, dan mekanisme implementasi akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Jika tercapai kesepakatan, rincian tersebut akan dituangkan dalam perjanjian definitif sesuai tata kelola setiap perusahaan dan institusi.RPB

# RUU Antispionase dan Ikhtiar Memperkuat Kedaulatan Nasional

**POSISI** geostrategis Indonesia yang membentang di antara dua benua dan dua samudera menjadikan wilayah nusantara sebagai titik sentral perhatian global dengan daya tarik geopolitik yang sangat tinggi.

## OLEH : REXI ASHROF *)

**KEUNGGULAN** komparatif ini diperkuat oleh sumber daya alam yang melimpah, khususnya cadangan mineral kritis yang menjadi tulang punggung industri masa depan, serta dinamika proses pembuatan kebijakan nasional yang memengaruhi peta perekonomian dunia. Faktor-faktor strategis tersebut secara otomatis menempatkan Indonesia sebagai target utama dalam radar persaingan intelijen internasional, di mana berbagai pihak eksternal berupaya memperoleh keunggulan kompetitif melalui pengumpulan informasi rahasia secara sistematis.

Ancaman spionase modern kini tidak lagi terbatas pada aspek pertahanan konvensional, melainkan telah meluas ke ranah ekonomi, industri, keuangan, hingga infrastruktur vital. Dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta, Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI, Edy Prasetyono dalam sebuah dialog di Televisi Swasta, Selasa (3/11) menjelaskan bahwa perolehan informasi strategis memberikan keuntungan masif bagi pihak luar yang dapat menyasar berbagai lini. Infiltrasi asing tersebut dapat berbentuk manipulasi perorangan untuk memengaruhi proses pembentukan kebijakan maupun pencurian rahasia industri yang mengancam stabilitas nasional, sehingga kesiapan penuh dalam menangkal seluruh bentuk ancaman tersebut menjadi sebuah keniscayaan mutlak bagi negara dalam menjaga kedaulatan.

Kondisi tersebut semakin kompleks seiring pesatnya disrupsi teknologi digital yang mengubah lanskap operasi pengumpulan data intelijen secara mendasar. Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, memaparkan bahwa instrumen spionase kontemporer telah beralih memanfaatkan teknologi siber tingkat tinggi untuk meretas informasi rahasia secara digital tanpa meninggalkan jejak fisik yang mudah terdeteksi. Kecepatan dan kecanggihan teknologi ini menuntut pembaruan kerangka hukum nasional agar senantiasa relevan dan responsif, mengingat instrumen hukum yang berlaku saat ini masih memerlukan perluasan definisi agar mampu menjangkau agen asing serta aktivitas spionase siber secara komprehensif di tengah dinamika global.

Menjawab tantangan kebangsaan tersebut, pemerintah telah menata dan menjalankan langkah-langkah penanggulangan yang terukur melalui aparat intelijen negara. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyampaikan bahwa penindakan awal terhadap ancaman intelijen asing memiliki landasan operasional yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara secara tegas memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara untuk melaksanakan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, serta penggalian informasi terhadap sasaran yang mengancam keamanan nasional, termasuk aktivitas separatisme dan spionase. Melalui mekanisme kontra intelijen yang ketat, temuan strategis tersebut selanjutnya disinergikan dengan aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum positif.

Meskipun sistem hukum yang ada saat ini telah bekerja secara aktif mendeteksi dan menangkal berbagai potensi ancaman di lapangan, upaya penguatan regulasi komprehensif tetap dipandang sebagai langkah strategis lanjutan untuk memperkokoh benteng kedaulatan nasional. Aturan yang masih tersebar di berbagai sektor idealnya terkonsolidasi dalam satu kekuatan hukum yang terpadu guna menghindari keraguan operasional serta menutup celah tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Konsolidasi hukum ini menjadi sangat krusial untuk mendefinisikan secara pasti batasan agen asing dan cakupan kepentingan nasional tanpa mengurangi jaminan kebebasan berserikat maupun prinsip-prinsip dasar demokrasi yang dianut oleh negara.

Kehadiran regulasi yang lebih tajam dan komprehensif justru berfungsi sebagai payung perlindungan legal bagi pejabat negara dan warga negara agar tidak mudah menjadi sasaran tuduhan tanpa dasar yang jelas. Selain itu, pembentukan kerangka hukum yang modern akan memperjelas pertanggungjawaban serta memperkuat koordinasi lintas institusi dalam merespons ancaman secara utuh, bukan sekadar melihatnya sebagai persoalan sektoral yang terisolasi. Dengan demikian, penguatan hukum antispionase menjadi bentuk perlindungan konkret terhadap kelangsungan hidup berbangsa yang jauh lebih vital bagi masa depan negara.

Sebagai langkah pembentukan regulasi yang tangguh, diskursus pembentukan undang-undang khusus maupun penerbitan aturan pelaksana teknis seperti peraturan presiden terus dimatangkan secara inklusif. Pemerintah bersama DPR dan para ahli terus membuka ruang dialog akademis serta forum diskusi terpumpun guna membedah aspek hukum, teknologi, hingga mekanisme operasional pencegahan secara menyeluruh. Pendekatan kolaboratif ini memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu memperkuat ruang gerak aparat penegak hukum sekaligus menjamin kedaulatan data dan integritas wilayah NKRI.

Dukungan penuh terhadap agenda pemerintah dalam mengakselerasi konsolidasi regulasi antispionase dan penguatan kapasitas intelijen siber merupakan modal utama bangsa. Dengan kepastian hukum yang kokoh, sinergi antarlembaga yang solid, serta adopsi teknologi pertahanan yang modern, Indonesia akan mampu mengamankan seluruh potensi strategis nasional dari berbagai bentuk intervensi dan ancaman spionase asing di masa depan secara berkelanjutan demi kejayaan bangsa. Perencanaan strategis yang komprehensif ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjaga stabilitas kawasan regional Asia Tenggara yang damai, mandiri, dan berdaulat penuh atas kekayaan serta masa depannya. *) *Praktisi Keamanan Siber*

# Akademisi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako

**LANGKAH** Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada 29 September 2026 lalu, menjadi angin segar bagi iklim ketatanegaraan kita. Di bawah komando Bahtra Bahong sebagai ketua, pembentukan Panja ini memantik kembali asa publik akan hadirnya instrumen regulasi Pemilu yang memenuhi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

## OLEH : MOHAMMAD FEIR CHALIFARDY NA'A, S.H., M.H.

**DI** tengah riuh rendah isu-isu elitis tersebut, ada satu celah fundamental yang kerap terpinggirkan dari sorotan utama, yaitu arah desain penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penguatan kelembagaan Bawaslu sudah saatnya berhenti dijadikan sekadar wacana normatif yang miskin pengejawantahan serius dalam naskah undang-undang. Meletakkan Bawaslu pada posisi yang lebih kokoh, baik dari segi kewenangan atributif maupun daya eksekutorialnya, adalah sebuah wacana yang patut diseriusi oleh Pemebentuk Undang-Undang. Ini bukan semata soal menebalkan postur sebuah institusi, melainkan ikhtiar krusial dan garda terakhir untuk menjaga muruah serta kualitas substansial demokrasi di Indonesia.

### HAK AKSES DATA SEBAGAI BAGIAN DARI PENGAWASAN SUBSTANTIF

Penulis memandang bahwa tanpa adanya jaminan akses data yang presisi dan real time, jalannya pengawasan di lapangan hanya akan menjadi "macan ompong yang sibuk meraba raba di ruang gelap." Preseden buruk ketiadaan akses ini juga memicu karut marut pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan, baik untuk anggota DPR, DPD, maupun Bakal Pasangan Cakada dari jalur perseorangan.

Merespons sengkarut tata kelola ini, pembentuk undang-undang pada agenda revisi kelak dituntut memiliki kejernihan paradigma. Harus ada kesadaran utuh bahwa secara kedudukan Bawaslu dan KPU berada pada garis yang sejajar, di mana relasi institusional di antara keduanya didesain berkarakter horizontal. Penulis menegaskan kembali bahwa secara eksplisit, Pasal 1 angka 7 UU No. 7/2017telah menyatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Konstruksi hukum ini sebelumnya juga telah dipancangkan kuat melalui Putusan MK Nomor 11/PUU VIII/2010, yang belakangan menjadi dasar pertimbangan dan perumusan pasal tersebut.

### MENGGAGAS UJI PETIK DARI SEKEDAR METODE MENJADI TAHAPAN

Pengawasan Pemiluy yang substantif tidak hanya sibuk mencentang daftar kelengkapan administrasi, tetapi berani melangkah lebih tajam untuk memastikan ada atau tidaknya ketepatan dan kesesuaian di balik dokumen yang tampak rapi. Apabila ada bagian krusial yang patut direvisi dari regulasi pemilu kita, maka salah satu terobosan utamanya adalah memuat agenda uji petik (spot checks) secara eksplisit ke dalam sejumlah tahapan pemilu yang krusial.

Ketiadaan uji petik secara formal dalam tahapan Pemilu inilah yang membuat upaya pengawasan di lapangan menjadi tidak optimal. Praktik uji petik, seperti yang dilakukan pasca tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), kerap terpaksa dieksekusi secara terburu-buru karena jadwalnya saling berkejaran dengan tahapan Pemilu lain yang sudah menanti di depan mata. Alhasil, Bawaslu acapkali kehabisan napas dan tidak memiliki kecukupan waktu untuk benar benar menguji tingkat kebenaran serta kesesuaian proses Coklit.

Penulis berpandangan bahwa Pembentuk Undang-Undang perlu melakukan reformulasi tahapan pemilu dengan presisi yang lebih matang. Harus didesain sebuah jeda tahapan (cooling period) yang diletakkan secara khusus sesudah tahapan Coklit dan verifikasi faktual berakhir. Ketersediaan ruang jeda ini sangat esensial untuk memberikan waktu yang proporsional bagi Bawaslu guna menguji kualitas penyelenggaraan teknis yang dilakukan oleh KPU melalui instrumen sampling secara acak.

### JUMLAH SDM PENGAWAS AD HOC

Dalam spektrum kerja Bawaslu beserta barisan Pengawas Ad Hoc di bawahnya, salah satu masalah paling krusial yang selalu berulang adalah intensitas pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam merespons masalah tata kelola pengawasan pada puncak tahapan Pemilu tersebut, Penulis menawarkan serangkaian opsi bagi para Pembentuk Undang-Undang dalam agenda revisi UU Pemilu. Pertama, mempertahankan skema satu pengawas tunggal per TPS, namun dibarengi dengan dukungan operasional yang memadai. Kedua, mendesain mekanisme pengawas tambahan yang basis argumennya bersandar pada indikator risiko (risk-based approach). Ketiga, membangun model pengawasan berlapis (layered supervision).

Dari ketiga opsi yang tergelar, Penulis secara rasional memandang bahwa opsi pertama dan kedua merupakan gagasan logis dan menjanjikan daya hantam yang presisi terhadap akar masalah di lapangan. Artinya, Pembentuk Undang-Undang tidak perlu merumuskan bahwa setiap TPS wajib memiliki dua atau lebih pengawas tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Sebaliknya, Pembentuk Undang-Undang perlu menetapkan norma yang memuat standar minimum kapasitas pengawasan dan indikator objektif untuk menentukan kebutuhan personel tambahan.

### SARAN PERBAIKAN

Dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sebagai lembaga pengawas elektoral, Bawaslu tentu tidak didesain sekadar menjadi pengamat yang pasif. Bawaslu bertugas menyediakan langkah dan sarana yang terukur untuk memastikan seluruh proses tahapan pemilu berjalan pada rel yang semestinya (on track). Sebagai manifestasi dari peran tersebut, Bawaslu menerbitkan Saran Perbaikan, Secara normatif, Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu No. 5/2022 telah mengatur bahwa institusi yang menerima Saran Perbaikan wajib melaksanakannya dalam rentang waktu paling lama tiga hari sejak dokumen tersebut disampaikan, atau menyesuaikan dengan tenggat waktu yang secara khusus ditentukan oleh jajaran Pengawas Pemilu.

Mencermati hal ini Penulis berpandangan bahwa pengaturan mengenai Saran Perbaikan sudah saatnya naik tingkat. Pengaturan ini tidak boleh lagi dibiarkan stagnan sebagai instrumen preventif yang hanya memiliki pijakan regulasi sebatas pada level Peraturan Bawaslu (aturan di bawah undang-undang).

**TAJUK**

# Pantang Lindungi Pelanggar Hukum

**KEBERANIAN** institusi penegak hukum sesungguhnya tidak hanya diuji ketika berhadapan dengan penjahat di luar pagar institusinya. Ujian terberat justru datang ketika hukum harus ditegakkan terhadap orang-orang yang pernah atau sedang menjadi bagian dari kekuasaan tertinggi institusi tersebut.

Itulah ujian yang kini dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyusul penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution, sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Cari Peta Wilayah

Bareskrim Polri, kemarin (Selasa, 3/11), mengumumkan tiga tersangka berpangkat jenderal bintang dua dan bintang empat berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga terlibat penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan jejak digital.

Lebih mengkhawatirkan, sasaran penyadapan diduga bukan hanya Presiden, melainkan juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis organisasi masyarakat, hingga pengusaha.

Kita mendukung langkah tegas Polri mengusut perkara tersebut. Penetapan tersangka, betapa pun tinggi pangkat dan jabatan seseorang, merupakan pesan penting bahwa tidak seorang pun boleh menikmati kekebalan hukum.

Namun, dukungan itu bukan cek kosong. Penetapan tersangka barulah pintu masuk menuju pembuktian. Polri mesti bekerja lebih keras, lebih transparan, dan lebih berani membongkar seluruh jaringan yang diduga terlibat.

Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan penyadapan, untuk kepentingan apa informasi dikumpulkan, siapa yang menikmati hasilnya, serta apakah terdapat penyalahgunaan perangkat dan kewenangan negara.

Jangan sampai pengusutan berhenti pada tiga nama. Apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, siapa pun mereka, proses hukum harus menjangkaunya.

Penyadapan ilegal bukan pelanggaran biasa. Ia merupakan ancaman terhadap hak privasi warga negara, keamanan informasi, bahkan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Apalagi, jika benar perangkat dan kewenangan yang semestinya digunakan untuk melindungi negara justru disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Itu berarti ada persoalan serius dalam pengawasan dan pengendalian kekuasaan.

Karena itu, penyidikan harus menjamin keutuhan barang bukti elektronik, membuka ruang pengawasan independen, serta memastikan hak para tersangka tetap dihormati. Asas praduga tak bersalah tidak boleh dikorbankan atas nama ketegasan.

Kita tidak menghendaki pengusutan yang gaduh di permukaan, tetapi keropos dalam pembuktian. Kita membutuhkan keberanian yang ditopang profesionalisme, bukan keberanian yang sekadar dipertontonkan.

Kasus ini sekaligus menjadi momentum untuk membersihkan kepolisian dari sorotan publik yang menyebut institusi tersebut kerap segan memeriksa perwira tinggi mereka. Polri harus membuktikan bahwa loyalitas tertinggi anggotanya bukan kepada atasan, kelompok, ataupun korps, melainkan terhadap konstitusi dan hukum.

Jangan ada jenderal yang dilindungi hanya karena pernah berkuasa. Jangan pula ada yang dihukum tanpa bukti. Di situlah kehormatan Polri dipertaruhkan. Hukum harus tegak, sekalipun harus mengadili orang-orang yang dahulu menegakkannya.*Media Indonesia*

TRIMEDIA GROUP
**PENERBIT:**
**PT. Trimedia Sulteng Mandiri**
No. Rek. Bank Sulteng, An. **PT. Trimedia Sulteng Mandiri**
**Acc. 0010107770011, Rek.BSI No. 7282773443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri**
**Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6**
**An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI**
**PERWAKILAN JAKARTA:** Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan
(Ahmad Averus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan)
PERCETAKAN: **TRIMEDIA GROUP**
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

WARTAWAN **HARIAN SULTENG RAYA**, DIBEKALI KARTU **PERS**/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM **BOX REDAKSI**

**PENDIRI/PIMPINAN UMUM:** Tri Putra Toana. **DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA :** Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara.
**PIMPINAN PERUSAHAAN:** Suyanto. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Irwan.
**REDAKTUR:** Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. **STAF REDAKSI:** Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. **SEKRETARIS REDAKSI:** Jane Lestari Parabak
**LITBANG:** A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. **BIRO DONGGALA:** Wahid Agus. **BIRO SIGI:** Feri Fadli. **BIRO PARMOUT:** Aslan Laeho. **BIRO TOUNA:** Budi.
**BIRO POSO:** Syamsuyadi. **BIRO BALUT:** - **BIRO MOROWALI:** Intan. **BIRO MOROWALI UTARA:** Ivan Tagora. **BIRO TOLITOLI:** Rustam.
**BIRO BANGKEP:** Pariaman Tambunan (Kepala Biro). **BIRO BANGGAI:** Pariaman T.
**DESIGN & ARTISTIK:** Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. **PEMASARAN/SIRKULASI:** Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. **KEUANGAN:** Febrianti.
**EMAIL:** sultengraya7th@gmail.com, sultengraya@gmail.com **TARIF IKLAN:** Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk.
**ALAMAT REDAKSI:** Jl. Rusa No. 36 **TLP:** 0451 4012 445 **ALAMAT PERCETAKAN:** Jl. Rusa No.36 Palu.

# Apindo Sulteng dan BTN Palu Teken PKS, Dorong Pengembangan Green Economy

**KETUA** DPP Apindo Sulteng, Chandra Wijaya (kanan) dan Branch Manager BTN KC Palu, Herry Gerald Talupun (kiri) pada kegiatan penandatanganan PKS bisnis di kantor BTN KC Palu, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palu, Rabu (4/11/2026). **FOTO: ISTIMEWA**

**SULTENG RAYA** - Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Tengah (Apindo Sulteng) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) KC Palu melakukan perjanjian kerja sama (PKS) bisnis di kantor BTN KC Palu, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palu, Rabu (4/11/2026).

Sebagai langkah awal, PKS ini menekankan kesepakatan pengembangan green economy (ekonomi hijau) untuk pertumbuhan usaha lintas sektor di bawah naungan Apindo Sulteng.

Ketua DPP Apindo Sulteng, Chandra Wijaya mengatakan, sinergi dengan BTN Palu dipandang sebagai langkah maju untuk menumbuhkan ekonomi sektor usaha yang ramah lingkungan.

Apindo Sulteng, kata dia, ingin mendukung usaha-usaha yang sudah eksis di lapangan yang telah memiliki potensi pasar dan bertumbuh.

"BTN Palu cukup eksis saat ini. Sudah sekira dua bulan ini kita intens komunikasi. Lewat kerja sama ini, kami ingin mengembangkan segmentasi usaha yang bersifat hijau, ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini yang tidak merusak alam, tapi potensi ke depannya itu berkembang; sektor pertanian, perkebunan, hingga kelautan," kata Chandra Wijaya kepada awak media usai pelaksanaan PKS itu.

Setali tiga uang, Branch Manager BTN KC Palu, Herry Gerald Talupun mengatakan, BTN Palu sangat menyambut baik PKS itu. Kata dia, dengan PKS yang terjalin dengan DPP Apindo Sulteng, BTN ingin mengubah stigma masyarakat bahwa BTN hanya soal KPR.

"Sekarang ini, kita berupaya mengimplementasikan visi BTN yakni Beyond Mertgage, lebih dari sekadar KPR. Kita ingin mendukung ekonomi masyarakat. Di bawah Apindo ada banyak usaha-usaha lintas segmen dan semua kalangan," kata Herry.

Lanjut Herry, melalui PKS itu juga, BTN Palu dan Apindo Sulteng akan mengelaborasi usaha lintas segmen, memberikan fasilitas-fasilitas perbankan, hingga kredit.

"Kami ingin skema pembiayaan konsep KUR masuk pada PKS ini dengan fasilitas kredit hingga Rp500 juta. Kredit yang dapat mendorong ekonomi tumbuh," tutup Herry Gerald Talupun. RHT

# Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia

**VALE** Indonesia menerima penghargaan pada rangkaian Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (3/11/2026). **FOTO: DOK. PT VALE**

**SULTENG RAYA** – PT Vale Indonesia Tbk (Vale Indonesia), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), menerima apresiasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusi dan kinerja terbaiknya dalam kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara kategori Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Minerba 2026, bagian dari rangkaian Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Penghargaan bagi kelompok pemegang IUPK ini diserahkan kepada Vale Indonesia oleh Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi. Kategori kepatuhan pembayaran PNBP mencakup enam dari total 42 apresiasi yang diberikan dalam penyelenggaraan tahun ini.

Pengakuan pemerintah ini menegaskan pentingnya kepatuhan fiskal sebagai bagian dari tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, pemenuhan kewajiban kepada negara turut memperkuat peran industri nikel dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan ekonomi nasional.

Komitmen Vale Indonesia dalam memenuhi kewajiban fiskal tercermin dari realisasi PNBP yang mencapai AS$52,06 juta sepanjang 2025, meningkat 87,9% dibandingkan AS$27,70 juta pada 2024. Kenaikan ini terutama ditopang oleh royalti produksi yang mencapai AS$45,55 juta, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Penguatan pembayaran kewajiban terkait pertambangan juga berlanjut pada 2026. Selama sembilan bulan pertama tahun ini, Vale Indonesia mencatat pembayaran royalti dan retribusi sebesar AS$101,63 juta, meningkat 91,4% dibandingkan AS$53,11 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya pembayaran kewajiban Perseroan kepada negara seiring pertumbuhan kegiatan usaha, sekaligus memperkuat peran industri nikel dalam mendukung perekonomian nasional.

## MEMPERKUAT KONTRIBUSI FISKAL

Sejak didirikan pada 1968, Vale Indonesia telah berkembang dari kegiatan penambangan dan pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan, menjadi perusahaan dengan portofolio pertumbuhan di sejumlah wilayah Sulawesi.

Selain mempertahankan kegiatan operasional di Sorowako, Perseroan terus mengembangkan kegiatan usaha di Bahodopi, Sulawesi Tengah, dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Perluasan portofolio tersebut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat posisi Vale Indonesia dalam rantai pasok nikel nasional.

Seiring berkembangnya kegiatan usaha, Perseroan terus memenuhi kewajiban kepada negara melalui pembayaran royalti dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pemegang IUPK, Vale Indonesia juga memiliki kewajiban pembagian laba bersih kepada pemerintah pusat dan daerah.

Bagi Perseroan, pertumbuhan bisnis dan kontribusi fiskal merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Pengembangan sumber daya mineral tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat industri nasional, tetapi juga untuk menghasilkan nilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

## KEPATUHAN DAN KOLABORASI INDUSTRI

Dalam laporannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Totoh Abdul Fatah, S.Si., M.A.P., menjelaskan bahwa Apresiasi Minerba 2026 memberikan sebanyak 42 apresiasi kepada badan usaha atas kontribusi dan kinerjanya dalam pengelolaan subsektor mineral dan batubara.

Jumlah tersebut terdiri atas 13 apresiasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor batubara, 15 apresiasi PPM sektor mineral, delapan apresiasi penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), serta enam apresiasi kepatuhan pembayaran PNBP.

Khusus aspek kepatuhan PNBP, apresiasi diberikan berdasarkan kelompok perizinan usaha pertambangan, meliputi IUP Mineral, IUP Batubara, IUP BUMN, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta IUPK.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T., berharap apresiasi tersebut dapat menjadi contoh bagi badan usaha lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Tri juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, media, akademisi, dan masyarakat dalam memastikan subsektor mineral dan batubara memberikan manfaat optimal bagi bangsa. Semangat tersebut sejalan dengan tema Minerba Convex 2026, "Membangun Bangsa, Memberdayakan Masyarakat".

Bagi Vale Indonesia, pengakuan tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan. Keberhasilan industri pertambangan tidak hanya diukur melalui pencapaian produksi dan kinerja keuangan, tetapi juga melalui pemenuhan kewajiban kepada negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Mewakili Perseroan, Head of Tax Vale Indonesia, Chandra Yudha, menyampaikan bahwa apresiasi pemerintah menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kewajiban fiskal seiring pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan.

"Bagi Vale Indonesia, apresiasi dari pemerintah atas kontribusi PNBP merupakan kehormatan sekaligus amanah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terbaik dalam pengelolaan sumber daya mineral. Kami meyakini bahwa pertumbuhan kegiatan usaha harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kewajiban kepada negara, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan daerah sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 33," ujar Chandra.

Lebih lanjut, Chandra menegaskan bahwa kontribusi fiskal merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Vale Indonesia dalam mendukung pengembangan industri mineral nasional yang berkelanjutan.

"Kami memandang pembangunan industri mineral nasional sebagai proses penciptaan nilai jangka panjang yang membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penguatan tata kelola, pemenuhan kewajiban fiskal, serta pengembangan proyek-proyek strategis, Vale Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi Indonesia," jelas Chandra.

Melalui apresiasi yang diterima dalam Minerba Convex 2026, Perseroan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. RHT

# BRI Salurkan Tunjangan Profesi Guru Non-ASN Seniliai Rp921,6 Miliar

**SULTENG RAYA** – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kesejahteraan guru dan kemajuan pendidikan di Indonesia.

Terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) Triwulan III 2026, BRI mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan dana senilai Rp921,6 miliar kepada 507 ribu penerima di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memerinci bahwa tunjangan tersebut merupakan akumulasi pembayaran untuk Juli, Agustus, dan September 2026. Para guru non-ASN yang telah memenuhi persyaratan dan lolos validasi data pun diminta segera memeriksa rekening masing-masing.

"Jadi, para guru honorer menerima Rp6 juta yang merupakan pembayaran TPG Juli, Agustus, dan September. Silakan dicek di rekening," ungkap Abdul Mu'ti.

Penyaluran TPG melalui BRI dilakukan berdasarkan instruksi pembayaran yang diterima dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam proses tersebut, BRI bertindak hanya sebagai bank penyalur yang menjalankan pencairan dana sesuai instruksi dan ketentuan yang berlaku, sedangkan kewenangan terkait penetapan penerima, besaran, serta jadwal penyaluran TPG berada pada instansi pemerintah yang berwenang.

Dengan dukungan infrastruktur dan jaringan layanan BRI yang luas, dana disalurkan langsung ke rekening penerima untuk memastikan proses berlangsung aman, efektif, dan akuntabel.

Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa penyaluran TPG menjadi wujud nyata peran aktif perseroan dalam mendukung kesejahteraan para guru sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan nasional.

"Sebagai mitra strategis pemerintah, BRI akan terus mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kami meyakini bahwa kesejahteraan guru merupakan fondasi penting bagi kemajuan pendidikan, karena dari tangan para pendidik inilah lahir generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia," ujar Dhanny.

Didukung lebih dari 7 ribu unit kerja dan 1,06 juta BRILink Agen yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI mampu menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan para penerima. Kekuatan jaringan tersebut turut memastikan penyaluran dana dapat dilakukan secara luas serta mudah diakses di berbagai wilayah Indonesia. RHT

**ILUSTRASI.** **FOTO: DOK. BRI**

# 7 Keturunan Indonesia Jadi Pejabat di Luar Negeri

**SULTENG RAYA** - Sejumlah tokoh keturunan Indonesia pernah menduduki jabatan penting dalam pemerintahan negara lain seperti Kanada.

Mereka memiliki garis keturunan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta.

Beberapa di antaranya bahkan berhasil menjadi kepala pemerintahan, wakil perdana menteri, hingga menteri di negara tempat mereka berkarier.

Berikut tujuh tokoh keturunan Indonesia yang sedang dan pernah menduduki jabatan penting di luar negeri:

### 1. ALVIN TEDJO

Alvin Tedjo menjabat sebagai sebagai Wali Kota Mississauga, Kanada, untuk periode 2026-2030.

Ia merupakan tokoh keturunan Tionghoa asal Padang, Sumatera Barat.

### 2. AHMAD ZAHID HAMIDI

Ahmad Zahid Hamidi merupakan Wakil Perdana Menteri Malaysia pada 2022.

Ahmad memiliki darah keturunan Jawa dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ponorogo, Jawa Timur.

Dilansir Free Malaysia Today, ayah Ahmad yang bernama Raden merupakan putra imigran asal Kulon Progo. Sementara itu, ibunya, Tuminah, merupakan keturunan masyarakat Ponorogo, Jawa Timur.

### 3. JUSTIN TRUDEAU

Justin Trudeau menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada sejak 2015-2025.

Ia memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari silsilah keluarga ibunya, Margaret Sinclair.

Nenek buyut dari pihak ibunya, Cornelia Louisa Indvelt, lahir di Padang, Sumatera Barat pada 1808. Cornelia merupakan putri dari seorang pria berkebangsaan Belanda yang menetap di Padang dan menikah dengan seorang wanita asli suku Nias.

### 4. RICHARD RAKOTONIRINA

Richard menjabat sebagai Menteri Pertahanan Madagaskar pada 2019-2023.

Ia merupakan keturunan generasi ke-12 perantau dari Indonesia di Madagaskar.

Pada 2013, Richard pernah menjelaskan bahwa kedatangan leluhur masyarakat Nusantara ke Madagaskar berlangsung melalui beberapa gelombang migrasi laut sejak abad ke-7.

"Jadi migran pertama itu orang Nusantara. Dalam sejarah itu kita nenek moyang kita dari Nusantara. Imigran di Madagaskar lain dari Suriname atau Afrika Selatan karena mereka dibuang. Jadi orang Indonesia di Madagaskar itu berjuang untuk kehidupan. Orang Indonesia itu berani sekali lah," kata Richard saat ditemui di acara Kongres Diaspora Indonesia II, Jakarta Convention Center.

Ia juga menjelaskan bahwa kedatangan orang Nusantara ke Madagaskar berbeda dengan migrasi masyarakat ke Suriname atau Afrika Selatan yang banyak terjadi akibat pembuangan pada masa kolonial.

Menariknya, Richard juga pernah menempuh pendidikan militer di Indonesia.

Ia mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung pada 2001, Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) pada 2005, serta pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2011 di Jakarta.

### 5. SOEWARTO MOESTADJA

Soewarto Moestadja menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Suriname pada 2010.

Ia merupakan keturunan Indonesia, tepatnya Kebumen, Jawa Tengah.

Kakek Soewarto berasal dari Kebumen. Leluhurnya dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda ke Suriname pada masa penjajahan.

### 6. RAYMOND SAPOEN

Raymond Sapoen merupakan mantan pejabat pemerintahan Suriname yang memiliki darah keturunan Banyumas, Jawa Tengah.

Raymond memiliki perjalanan panjang dalam pemerintahan Suriname. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada 2010-2012, kemudian menjadi Menteri Perdagangan dan Industri pada 2012-2014.

Setelah keluar dari pemerintahan, Raymond bergabung dengan kelompok oposisi dan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum Suriname pada Mei 2015. Namun, ia gagal memenangkan pemilu tersebut.

### 7. YUSOF ISHAK

Yusof Ishak menjabat sebagai Presiden pertama Singapura untuk periode 1965-1970.

Yusof merupakan seorang Melayu keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Garis keturunan tersebut berasal dari pihak ayahnya.

Leluhurnya merupakan bangsawan Minangkabau bernama Datok Janaton. Pada pertengahan abad ke-18, Datok Janaton bersama saudaranya, Datok Setia, dan sejumlah pengikut bermigrasi ke Kedah, Malaysia.

Mereka kemudian menyatakan kesetiaan kepada Sultan Kedah. CNN

---

**RESPONS** dari halaman .....1

Ia mendorong rekan-rekan sejawatnya di Senayan mengambil langkah nyata dengan mengusulkan dan menggulirkan hak angket DPR RI untuk mengusut persoalan tersebut secara terbuka melalui mekanisme konstitusi.

Menurut Safri, tuntutan masyarakat agar Gibran diganti bukan lagi sekadar perbincangan politik. Aspirasi itu mencerminkan kekecewaan publik terhadap proses hukum dan politik yang mengiringi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

"Kita tidak bicara soal manuver politik semata. Yang jadi persoalan adalah fondasi berbangsa dan bernegara. Ada masalah serius terkait konstitusi yang harus dijelaskan kepada rakyat. Gelombang aspirasi masyarakat yang menghendaki Gibran diganti tidak boleh dianggap sebagai suara biasa," ujar Safri dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, besarnya aspirasi masyarakat harus dijawab melalui langkah politik yang bertanggung jawab, bukan sekadar pernyataan atau perdebatan di ruang publik.

Karena itu, Safri secara khusus meminta Fraksi PKB DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendorong penyelidikan melalui hak angket. Dengan mekanisme tersebut, berbagai persoalan yang dipertanyakan masyarakat dapat dibuka dan diperiksa secara terang melalui lembaga perwakilan rakyat.

"Saya meminta teman-teman di Fraksi PKB DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat ini dengan segera mengusulkan dan menggulirkan hak angket terkait persoalan Gibran. Jangan biarkan pertanyaan dan kekecewaan publik terus berkembang tanpa ada penjelasan yang terbuka. DPR harus menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal," tegasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.

Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026. Majelis hakim dipimpin Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Majelis hakim juga menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar surat tersebut ditarik dan dimusnahkan.

Putusan MA ini menambah perhatian publik terhadap berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perjalanan politik Gibran menuju kursi Wakil Presiden. Bagi Safri, persoalan tersebut semakin memperkuat pentingnya keterbukaan dan pemeriksaan melalui mekanisme konstitusional.

Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada saling tuding atau perdebatan politik, tetapi dapat dilakukan melalui proses kelembagaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Safri juga mengingatkan bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan publik tidak berarti seluruh proses yang mengantarkannya ke jabatan tersebut tidak boleh lagi dipertanyakan.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa karena seseorang sudah menduduki jabatan, maka persoalan hukum dan konstitusi yang mengiringi proses pencalonannya tidak boleh lagi diperiksa. Negara ini berdiri di atas konstitusi, bukan di atas kepentingan orang atau kelompok tertentu," katanya.

Ia menambahkan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, suara masyarakat yang meminta adanya evaluasi terhadap posisi Gibran harus mendapat ruang untuk diperjuangkan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi.

"Kalau konstitusi bisa dikesampingkan demi kepentingan politik, lalu apa artinya kedaulatan rakyat? Rakyat memberikan mandat kepada pemimpin melalui kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan itu justru dikhianati. Karena itu, DPR harus berani membuka persoalan ini secara terang melalui hak angket," pungkasnya. WAN

---

**INOVASI** dari halaman .....1

dan seluruh kalangan," harapnya atas kegiatan yang digelar PT. HND Gemilang Solusindo (HGS) selaku perusahaan penyedia layanan dan solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berbasis di Makassar.

Turut hadir, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Irwan, Sekretaris Dinas Pendidikan Syam Zaini, kepala sekolah dan guru serta perwakilan OPD Provinsi, rumah sakit dan perguruan tinggi. *WAN

**TERINTEGRASI** dari halaman .....1

Ia menjelaskan SNT tersebut dirancang khusus agar peserta didik nanti anak-anak asli dari kabupaten setempat.

"Hadirnya fasilitas SNT ini ke depan akan memberikan akses dan peluang pemerataan pendidikan yang lebih dekat bagi warga di Sigi dan Donggala," ucapnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah harus mengawal seluruh proses pembangunan SNT agar dapat selesai tepat waktu.

Ia mengatakan berbagai aspek penting yang harus disiapkan secara matang, meliputi kesiapan lahan minimal 20 hektare, perizinan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), sarana transportasi pendukung ke lokasi, serta penunjang teknis lainnya.

Anis menyebutkan proyek strategis nasional tersebut sudah mengantongi persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pada intinya persiapannya harus berjalan optimal tanpa hambatan guna mendukung program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan," kata dia. ANT

**PERTAMINA** dari halaman .....1

memperoleh QR Code sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses terhadap BBM bersubsidi bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan dan mendukung kelancaran penanganan karhutla di lapangan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan bahwa Pertamina siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung kebutuhan energi selama penanganan karhutla berlangsung. Ke depan, koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran akan diperkuat guna mempercepat proses administrasi dan penerbitan QR Code bagi kendaraan operasional yang membutuhkan. WAN

**PENGURUS** dari halaman .....1

Kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua I DWP Kabupaten Parigi Moutong, Ros Rahmawati, Ketua Bidang Ekonomi Mastin Trinugra, Ketua Bidang Pendidikan Habsa Adrudinur, Sekretaris DWP Tina Setiana Hance, serta anggota DWP dari sejumlah OPD.

Selain pengukuhan pengurus, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, meningkatkan kedisiplinan anggota, serta memperkuat tertib administrasi dan keberlangsungan organisasi DWP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam kegiatan itu, turut dibahas tujuh program unggulan DWP Pusat atau Sapta DWP, yakni DWP Sehat, DWP Literasi, DWP Berdaya, DWP Cerdas, DWP Mengajar, DWP Lingkungan, dan DWP Peduli.

Sekretaris DWP Kabupaten Parigi Moutong, Tina Setiana Hance, berharap pengukuhan pengurus baru dapat meningkatkan aktivitas organisasi, baik dari sisi partisipasi anggota maupun pelaksanaan program kerja.

Ia juga mengharapkan seluruh anggota lebih aktif mengikuti kegiatan organisasi serta meningkatkan kedisiplinan, termasuk dalam penggunaan seragam resmi DWP sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, seluruh DWP OPD diharapkan dapat menerapkan tujuh program unggulan DWP Pusat secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga program organisasi mampu memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat. AJI

---

**RINGKUS** dari halaman .....1

Menurut laporan polisi, pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 14.00 WITA, korban dihubungi MH yang menawarkan kerja sama pengisian 99 tabung gas 3 kg.

Korban diminta menukar tabung gas kosong miliknya dengan tabung gas terisi seharga Rp35.000 per tabung.

Keesokan harinya, Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 11.00 WITA, Muhammad Hasan bersama dua orang temannya datang ke rumah korban di Desa Jamor Jaya dengan menggunakan mobil Suzuki New Carry Pick Up.

Namun, MH tidak membawa tabung gas isi yang dijanjikan dan beralasan mobil pengangkut tabung sudah lewat ke arah Bungku. MH kemudian membawa kabur tabung gas kosong milik korban serta meminta uang BBM sebesar Rp600.000. Setelah itu, nomor telepon Hasan tidak dapat dihubungi lagi.

Berdasarkan penyelidikan, Tim URC Resmob Elang Tokala memperoleh informasi bahwa para terduga pelaku berada di wilayah Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

Pada Kamis 29 Oktober 2026 sekitar pukul 22.00 WITA, tim mengamankan RF di rumahnya. Dari interogasi, RF mengakui telah menyewa mobil pick-up New Carry dengan Nopol DP 8657 NB yang digunakan Hasan, MD, dan AD untuk menuju Morowali Utara memuat tabung gas.

Pengembangan berlanjut. Pada Sabtu 31 Oktober 2026 sekitar pukul 00.30 WITA, tim mengamankan MS di rumah orang tuanya di BTN Berlian Land, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola Selatan, Kabupaten Sigi.

Dalam keterangannya, MS mengaku bersama MH dan AD berangkat dari Desa Wani, Donggala, pada 3 Oktober 2026 menuju Morowali Utara dengan dalih memuat tabung gas milik paman MH.

Setibanya di rumah korban, MH bertemu Muhammad Sultoni dan menyuruh kedua temannya memuat tabung gas 3 kg.

Menurut keterangan MS, tabung gas tersebut kemudian dibawa ke Desa Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, dan dijual seharga Rp150.000 per tabung dengan total hasil penjualan Rp15.000.000. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada AD, MS, dan RF.

Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil New Carry dengan Nopol DP 8657 NB dan 34 buah tabung gas 3 kg (tabung melon).

Saat ini, polisi masih memburu dua terduga pelaku lainnya, yakni MH dan AD. Menurut laporan kepolisian, keduanya diduga merupakan residivis kasus pencurian.

Kedua terduga pelaku yang telah diamankan disangkakan dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 372 KUHP tentang penipuan/perbuatan curang dan penggelapan.

Tim masih melakukan pengembangan untuk menangkap dua pelaku yang masih buron. VAN

SULTENG RAYA
PALU NHGHYA

# Sulteng Usulkan Dua Inovasi Solusi Persoalan Masyarakat Pada IGA 2026

Reny A Lamadjido

**SULTENG RAYA-**Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengusulkan dua inovasi unggulan daerah sebagai solusi persoalan dasar masyarakat dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.

"Dua inovasi ini terdiri dari satu inovasi digital yaitu SEHATI (Sistem Elektronik Kesehatan Terintegrasi) dan satu inovasi nondigital yaitu pemberdayaan petani miskin," kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan inovasi SEHATI merupakan platform digital yang menghubungkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), BPJS Kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Melalui SEHATI, warga yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-nya dinonaktifkan maupun belum memiliki jaminan perlindungan kesehatan tetap dapat berobat di seluruh fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Warga cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili Sulawesi Tengah sebagai bukti untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Dia mengatakan inovasi tersebut lahir dari banyaknya keluhan warga akibat penonaktifan kepesertaan JKN menyusul perubahan desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Sosial.

"Jangan sampai orang sakit terhalang berobat hanya karena tidak punya biaya atau jaminan kesehatan," ujarnya.

Ia menekankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak boleh terhambat oleh kendala administrasi.

Sementara itu, inovasi Pemberdayaan Petani Miskin menyasar masyarakat tani yang tidak memiliki lahan usaha tani, memiliki lahan sempit, maupun terkendala modal.

"Program diarahkan untuk mengurangi jumlah rumah tangga petani miskin dan anggota keluarganya yang berisiko stunting," ujarnya

Ia mengatakan melalui pendekatan tersebut, sektor pertanian diharapkan menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus memperbaiki kualitas hidup keluarga petani. ANT

# UIN Palu Target Juara Olimpiade Sains dan Riset PTKIN di Yogyakarta

**SULTENG RAYA-**Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, menargetkan juara pada Olimpiade Agama, Sains dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tingkat Nasional 2026 di Yogyakarta dengan mengirim sembilan kontingen dari kampus tersebut.

"Sembilan mahasiswa dikirim mengikuti babak final, setelah berhasil melalui tahapan seleksi. Kami optimis dapat meraih hasil positif," kata Rektor UIN Datokarama Palu Prof Lukman Thahir, Selasa (3/11/2026).

Ia mengemukakan keikutsertaan mahasiswa dalam OASE merupakan bagian dari strategi penguatan mutu akademik perguruan tinggi, sekaligus sarana mengevaluasi efektivitas pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa yang selama ini dilaksanakan oleh universitas.

Kemudian hasil kompetisi nanti menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembinaan prestasi mahasiswa secara berkelanjutan. "Sekaligus memperluas peluang kolaborasi akademik dengan perguruan tinggi lainnya," ujarnya.

Sementara itu Wakil Rektor III UIN Datokarama Dr Faisal Attamimi menjelaskan para kontingen yang dikirim merupakan bagian dari upaya universitas memperkuat budaya akademik yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi.

Kegiatan yang mengusung tema "Tumbuh dan Berkembang Bersama Prestasi" mempertemukan 497 finalis dari 54 PTKIN yang berkompetisi dalam 18 cabang lomba bidang agama, sains, dan riset.

Kompetisi tersebut tidak hanya menjadi ajang mengukur kemampuan akademik mahasiswa, tetapi juga ruang pengembangan kreativitas, inovasi, penelitian, dan penguatan integrasi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai keislaman.

"Kami ingin mahasiswa UIN Datokarama mampu menunjukkan kualitasnya dan bersaing secara sehat dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain di Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, keikutsertaan dalam OASE memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan kapasitas mahasiswa, termasuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan persoalan, mengembangkan gagasan inovatif, dan membangun jejaring akademik antarkampus.

"Pengalaman mengikuti kompetisi nasional diharapkan menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk terus menghasilkan karya ilmiah, mengembangkan penelitian, dan meningkatkan daya saing UIN Datokarama," ucapnya.

Ia mengatakan capaian kontingen dari hasil kompetisi nanti ditindaklanjuti melalui pembinaan talenta, pengembangan karya ilmiah, dan peningkatan kualitas pendidikan sehingga prestasi mahasiswa tidak berhenti pada kompetisi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Lukman Thahir

"Kami mempersiapkan mahasiswa mengikuti lomba dengan kemampuan akademik, penguasaan materi, mental bertanding, serta kepercayaan diri," tutur Faisal.

Olimpiade Agama, Sains, dan Riset diselenggarakan Kementerian Agama pada 3-7 November 2026 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ANT

# Pemkot Palu Catat Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Capai 69 Persen

Syarifudin

**SULTENG RAYA-**Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, mencatat realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp287,01 miliar atau 69 persen dari target sebesar Rp415,73 miliar hingga 31 Oktober 2026.

"Dari 13 jenis pajak daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan mencatat persentase realisasi tertinggi, yakni 78 persen atau sebesar Rp11,30 miliar dari target Rp14,50 miliar," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu Syarifudin, Selasa (3/11/2026).

Menurut dia, penerimaan pajak perhotelan turut didukung tingkat hunian hotel di Kota Palu yang terus meningkat seiring bertambahnya kegiatan dan penyelenggaraan berbagai acara di daerah tersebut.

Selanjutnya, Pajak Penerangan Jalan mencapai realisasi 76,4 persen atau Rp57,30 miliar dari target Rp75 miliar. Kemudian, PBJT Makan dan Minuman terealisasi 75,3 persen atau Rp54,31 miliar dari target Rp72,10 miliar.

Selain itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Opsen mencatat realisasi 71,9 persen atau Rp31,43 miliar dari target Rp43,74 miliar.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi 68,3 persen atau Rp25,93 miliar dari target Rp38 miliar, sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencapai 66,4 persen atau Rp29,86 miliar dari target Rp45 miliar.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen mencatat realisasi Rp40,39 miliar atau 65,1 persen dari target Rp62 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp20,43 miliar atau 61,4 persen dari target Rp33,30 miliar.

Kemudian PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp9,17 miliar atau 61,2 persen, Pajak Reklame Rp3,55 miliar atau 54,7 persen, serta Pajak Air Tanah Rp2,37 miliar atau 31,7 persen.

Adapun dua jenis pajak dengan persentase realisasi terendah, yakni PBJT Jasa Parkir sebesar Rp882,03 juta atau 29,4 persen dari target Rp3 miliar, dan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp13,6 juta atau 18,1 persen dari target Rp75,16 juta.

Syarifudin mengatakan Bapenda terus mengintensifkan pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak maupun terlambat melakukan pembayaran.

Selain pengawasan dan penagihan, optimalisasi penerimaan juga dilakukan melalui pemantauan transaksi usaha menggunakan alat perekam transaksi atau tapping box bagi pelaku usaha sebagai bagian dari pengawasan penerimaan pajak daerah.

Ia berharap dengan upaya tersebut, penerimaan PAD Kota Palu terus meningkat, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir 2026. ANT

# Untad Ikuti Lokakarya Nasional Modernisasi Kurikulum Pertanian Presisi

**SULTENG RAYA-**Universitas Tadulako (Untad) turut berpartisipasi dalam PASEC National Stakeholder Workshop bertajuk "From Needs and Competences to Curriculum Modernization: Indonesian Context" yang digelar secara hibrida, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan dipusatkan di Collaboration Room Perpustakaan Kampus IPB Darmaga, Bogor, sementara sivitas akademika Untad mengikuti secara daring dari Laboratorium Terpadu Untad, Palu.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Untad, Dr. Sc. Agr. Aiyen Tjoa, M.Sc., yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan lokakarya dilatarbelakangi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, termasuk terhadap ketahanan pangan dan kondisi lingkungan.

"Kita bisa lihat pada hari ini bagaimana perubahan iklim mengakibatkan harga pangan yang luar biasa dan keadaan lingkungan yang sulit terkontrol," ujarnya.

Menurut Aiyen, kondisi tersebut menuntut perguruan tinggi lebih fleksibel dalam menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Terlebih, pertanian presisi kini mengandalkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Ia menjelaskan, kegiatan PASEC sebelumnya melibatkan tiga perguruan tinggi di Indonesia, yakni Untad, Universitas Syiah Kuala (USK), dan IPB University, bersama pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan.

Ketua Tim PASEC IPB University, Prof. Dr. Lina Karlinasari, S.Hut., M.Sc.F.Trop., menjelaskan PASEC merupakan konsorsium kerja sama di bawah skema Erasmus Plus Capacity Building for Higher Education. Program ini berfokus pada modernisasi kurikulum pendidikan tinggi bidang pertanian presisi dan lingkungan berkelanjutan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi perubahan iklim.

Konsorsium tersebut melibatkan enam negara, yakni Indonesia, Thailand, Maladewa, Kroasia, Serbia, dan Belgia. Di Indonesia, program dilaksanakan IPB University, USK, dan Untad dengan koordinasi pelaksanaan di Untad melalui Fakultas Pertanian.

Berdasarkan hasil survei kebutuhan dan kompetensi, masih ditemukan kesenjangan kemampuan, terutama dalam penguasaan teknologi digital dan prinsip keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) dan drone juga belum merata.

Meski demikian, institusi pendidikan dinilai memiliki kekuatan dalam pembelajaran lapangan dan interaksi dengan pemangku kepentingan sektor pertanian. Namun, fleksibilitas kurikulum dan kompetensi sumber daya manusia masih perlu diperkuat.

Koordinator Proyek PASEC, Assoc. Prof. Vesna Poslončec-Petrić, PhD, dari Fakultas Geodesi University of Zagreb, Kroasia, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

WAKIL Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Untad, Dr. Sc. Agr. Aiyen Tjoa, M.Sc ikut berpartisipasi dalam kegiatan PASEC National Stakeholder Workshop bertajuk "From Needs and Competences to Curriculum Modernization: Indonesian Context" yang digelar secara hibrida, Kamis (29/10/2026). **FOTO: HUMAS RIYAN**

"Universities have an important role in addressing those challenges, but they can't do this alone," ungkapnya.

Ia menyebutkan, PASEC menargetkan penyusunan 30 mata kuliah baru, 18 kursus pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning), serta sedikitnya 15 perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dan industri.

Dalam lokakarya tersebut, sejumlah narasumber turut memaparkan materi mengenai modernisasi kurikulum, implementasi pertanian presisi di Sulawesi Tengah, sertifikasi dan standar pertanian organik, serta pertanian cerdas dan keberlanjutan lingkungan.

Seluruh masukan peserta akan dikaji tim PASEC untuk menyempurnakan Katalog Kompetensi sebagai acuan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan studi kasus praktis di perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, Untad berharap dapat berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab tantangan perubahan iklim, khususnya di sektor pertanian dan lingkungan.*ENG